

Hubungan industrial di Indonesia aspek politik dan perubahan aturan di tempat kerja dekade sembilan puluhan dan awal dua ribuan

Batubara, Cosmas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74597&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Di awal dekade sembilan puluhan terjadi pergeseran buruh atau angkatan kerja. Jumlah buruh yang bekerja di sektor industri makin bertambah jumlahnya. Dengan bertambahnya buruh yang bekerja di industri dan mempunyai hubungan kerja, maka masalah hubungan buruh dengan manajemen atau hubungan industrial yang dikenal dengan istilah labour management relations atau industrial relations makin penting. Dunlop mengemukakan ada tiga pelaku hubungan industrial yaitu : buruh, manajemen dan pemerintah. Interaksi dari ketiga pelaku hubungan industrial dapat mempertahankan, mengubah atau membuat baru dari the rules of the workplace (aturan di tempat kerja). Dahrendorf berpendapat bahwa adanya dekomposisi buruh, dekomposisi modal dan kelas menengah baru menyebabkan perubahan di masyarakat industri.

Studi ini mau menjelaskan aspek politik dari perubahan aturan di tempat kerja selama dekade sembilan puluhan sampai awal dua ribuan di tingkat nasional dan dampaknya ke daerah tingkat Kabupaten/Kotamadya dan tingkat perusahaan. Studi ini mau menjelaskan berapa jauh teori Dunlop dan Dahrendorf terwujud selama masa waktu tersebut di atas.

Perkembangan ekonomi Indonesia dari industri substitusi import masuk ke orientasi export. Dengan berorientasi export berarti produk-produk industri Indonesia akan masuk ke pasar internasional. Dalam rangka perkembangan industri tersebut, Indonesia mendapat kemudahan mengekspor produknya ke Amerika Serikat. Posisi seperti ini menyebabkan Indonesia harus mempertimbangkan tuntutan dari internasional agar masalah-masalah hubungan industrial di Indonesia memenuhi standard perburuhan internasional. Studi ini mau menjelaskan kaitan tuntutan standard perburuhan internasional dari luar negeri dengan perubahan dari aturan di tempat kerja.

Sejak awal pemerintahan Soeharto ada kelompok yang masuk dalam aliran pemikiran kritis pluralis. Kelompok ini menuntut pelaksanaan hukum, mengurangi peran pemerintah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Pembangunan selama dua puluh lima tahun melahirkan lebih banyak orang yang kritis dan menuntut hak-haknya. Studi ini mau melihat kaitan budaya politik buruh dan perubahan aturan di tempat kerja.